

Makalah

WORKSHOP Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan

Yogyakarta, 13 - 15 November 2007



Pendidikan: Kisah Yang Selalu Gelap

Oleh:

Eko Prasetyo

*Penulis sejumlah buku Resist Book dan
Kepala Staf Divisi Program PUSHAM UII*

PENDIDIKAN: KISAH YANG SELALU GELAP¹

Oleh: Eko Prasetyo²

Masih pagi sekali, Bapak Guru sudah siap di kelas
Kepalanya yang miskin dan merana terkantuk-kantuk,
Kemudian terkulai diatas meja.
Kami, anak-anak yang bengal dan nakal, beriringan masuk
Sambil mengucapkan: 'selamat pagi Bapak Guru'
Bapak Guru tambah nyenyak. Dengkur dan air liurnya
Seakan mau mengatakan: 'bapak sangat lelah'

.....

Sudah siang, Bapak Guru belum juga siuman
Hanya rit celananya yang setengah terbuka
Seakan mau mengatakan: 'bapak habis lembur semalam'
Ada yang cekikikan. Ada yang terharu dan mengusap matanya
Yang berkaca-kaca. Ada pula yang lancang membelai-belai
Gundulnya sambil berkata: 'kasihan kepala yang suka ikut penataran ini'.....

(Joko Pinurbo: Terkenang Celana Pak Guru)

1. Kisah pendaftaran:

Semula saya tak menduga kalau antrian pendaftaran itu panjang. Seorang bilang pada saya kalau ia sudah menunggu sejak petang. Padahal saya datang sudah mendekati pukul 10 siang. Bisa-bisa saya tak *kebagian* formulir. Usaha saya bisa sia-sia. Mendaftarkan anak pada sekolah yang terkenal paling favorit di kota ini. Menyebut kata favorit untuk sejumlah kriteria yang agak menggelikan. Favorit nama yang melukiskan bagaimana sekolah mampu: meluluskan anak mendekati 100%, menciptakan anak berkepribadian baik dan tidak bermasalah, memenjarakan anak sehingga tak merepotkan kita sebagai orang tua. Label favorit yang membuat sekolah kemudian dengan gampang mencantumkan harga.

Hampir dua jam saya menunggu tiba giliran. Di ujung meja ada panitia yang senyumnya terasa seragam dan hambar. Kepalanya tegak dengan duduk di bangku yang tersedia berjejer rapi. Ia hanya menyerahkan selebar formulir. Kata-katanya standar: mohon diisi dulu. Formulir itu berisi data tentang diri. Lengkap dan mirip dengan KTP. Saya mencoba bertanya sana-sini, tapi tidak dijawab dengan antusias. Panitia tak menyediakan waktu untuk menanggapi pertanyaan apalagi kritik. Di meja ada brosur yang juga sudah saya dapatkan. Isinya tentang materi pelajaran dan gambar foto kelas yang terdiri dari bangku-bangku. Kelak saya baru tahu kalau bangku itu akan menjadi syarat mutlak jika ingin mendirikan sekolah³.

Sebelah saya seorang bapak tampak berjalan lemah. Dari yang saya dengar: bapak ini meminta keringanan biaya. Dan sialnya, sekolah ini tergolong bukan lembaga yang suka memberi keringanan. Sempat orang bilang kalau bapak tadi dikasih komentar keras: 'kalau mau gratis daftar sekolah lain saja pak!' Itulah pasar pendaftaran, tak bisa memberi kompensasi dan membiarkan orang berjuang sendiri. Lukisan umum pendaftaran sekolah

¹ Disampaikan untuk kegiatan workshop Pusham UII 15 November 2007

² Penulis sejumlah buku Resist Book dan kepala staf divisi program Pusham UII. Kini mendirikan sekolah gratis, Rumah Pengetahuan Amartya

³ Saat saya hendak mendirikan sekolah urusan selain badan hukum adalah materi pelajaran, guru dan ketersediaan bangku. Ini sangat menyulitkan bagi gagasan sekolah alternatif yang membebaskan.

adalah orang tua mencari mana sekolah yang cocok. Sekolah-entah itu swasta atau negeri-hanya pamer brosur dan spanduk. Spanduk dipasang dengan cara yang ganas dan menggelikan. Ada yang ditaruh di muka pasar, pinggir jalan, depan tempat ibadah. Dan seperti iklan obat penuh dengan kata-kata hiruk pikuk yang menjanjikan.

Untuk tingkat Sekolah Dasar sekalipun pemerintah diam dan membiarkan⁴. Mau daftar silahkan dan yang tidak juga nggak apa-apa. Diknas sekalipun hanya mampu membuat jadwal pendidikan. Tiap kali pendaftaran digelar maka yang muncul adalah keluhan, kritik dan kejengkelan⁵. Mengeluh karena tak ada tarif yang disepakati tentang uang pendaftaran. Mengkritik karena kurang adanya keterbukaan. Diterima atau tidaknya siswa sepenuhnya dinilai oleh sekolah. Kemudian jengkel karena sekolah mengawali proses administrasi yang birokratis dan berbelit-belit. Itu yang membuat sebuah sekolah bisa siswanya tidak berasal dari warga sekitar. Populasi siswa dipilih secara acak dan tak ada ketentuan tegas tentang lokasi geografis peserta didik.

Inilah soal yang kelak akan menjadi bom waktu. Lembaga pendidikan yang jauh dari masyarakatnya sendiri. Pendidikan yang kemudian tidak berkaca pada realitas sosial. Andai pendaftaran ini kemudian dikerjakan dengan memperhatikan hak peserta didik bisa jadi urusannya tidak panjang dan merepotkan. Tidak akan terjadi sebuah sekolah digabung, sementara yang lain kelebihan peserta. Pengelolaan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan siswa tapi memburu proyek membuat pendidikan berhadapan dengan masalah akses.

Pendaftaran siswa mempertunjukkan kondisi yang merisaukan. Pengabaian hak peserta didik, beban pembiayaan yang tidak terkontrol dan sistem seleksi tertutup. Seorang teman pernah berkisah: ia ditest sama anaknya. Duduk bersebelahan dengan jarak yang agak jauh. Giliran ia ditanya tentang biaya sambil panitia melirik anaknya. Tawar-menawar uang dengan terbuka-yang meletakkan anak di meja taruhan- ini membuat ia gemetar dan mau tak mau mengikuti apa yang dikatakan pihak sekolah. Biaya siluman yang namanya biasa beragam: uang infak, wakaf, dana sosial, uang seragam, sepatu, buku, uang gedung dll-hanya mensiratkan tentang bagaimana pendaftaran jadi arena untuk 'menekan dan memeras' peserta didik. Ringkasnya, tidak negeri maupun swasta, biaya buku sekolah dan pemeliharaan bangunan jadi komponen yang terus ditarik.

Ini belum jika pendaftaran harus melibatkan kegiatan pengenalan baru. Entah namanya Ospek, training ESQ, studi awal atau yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang tak membutuhkan persetujuan siswa. Sudah digolongkan dalam paket pendaftaran. Tinggal peserta didik menyetujui, mengikuti dan kemudian ditarik pembiayaannya. Usaha paling seru untuk memeras siswa dengan cara yang lebih tak masuk akal. Malahan dalam pengenalan awal tak jarang timbul kekerasan antara senior kepada juniornya. Spiral kekerasan berawal dari metode pengenalan yang kerap kali memakai cara-cara kekerasan.

⁴ Dari laporan Balitbang Depdiknas dinyatakan, bahwa hingga kini masyarakat masih menanggung 53,74-73,87 persen total biaya pendidikan, termasuk penyelenggaraan sekolah swasta. Sementara pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan sekitar 26,13 sampai 42,26% dari keseluruhan biaya pendidikan Lih Kompas 7 November 2005

⁵ Pemerintah tak melakukan insiatif apapun dalam pendaftaran. Baik itu informasi tentang sekolah, kualitas apalagi beban biaya. Semua informasi tentang pendidikan diperoleh melalui kegiatan orang tua dan klasifikasi sekolah bukan karena ada standar pemerintah tapi berangkat dari pembicaraan dari mulut ke mulut. Jadi favorit adalah peringkat sekolah yang diberikan public dalam arena gosiip. Sangat menyedihkan.

2. Kisah Pembelajaran

Semula saya tak menyangka jika adegannya begitu. Pertunjukan anak-anak kecil untuk menandai kelulusan. Kebetulan anak saya disekolahkan pada lembaga pendidikan agama milik salah satu partai Islam yang populer. Sebuah operet segera akan dipentaskan. Saya dan beberapa orang tua membawa kamera. Lensa dibidikkan ke arah panggung. Kami ingin merekam pertunjukan yang pasti mengagumkan. Kenangan dari anak-anak yang mungkin akan berguna kelak. Tak disangka inilah operet mengejutkan yang saya baru pertama lihat:

Anak-anak berusia 4-5 tahun berbaris rapi. Sebuah suara dentuman yang keras menggema. Mereka tiba-tiba rebah. Ada yang lupa masih berdiri tapi terus menjatuhkan diri melihat teman-temannya. Seseorang kemudian berdiri dan melantunkan ayat-ayat suci. Sebuah kutipan tentang peristiwa kiamat. Anak-anak itu hanya berdiri dan melafalkan artinya satu-persatu. Panggung ditutup dan anak-anak itu berbaris masuk ruangan. Operet yang tak sampai 10 menit itu tamat. Saya hanya merekam sebentar. Beberapa orang tua mungkin juga begitu. Yang jelas saya agak tertekur lama, melihat si kecil berusia 6 tahun melakonkan peran manusia yang tinggal di hari kiamat!

Inilah pendidikan kita belakangan ini. Kegiatan diselenggarakan dengan tidak menimbang, minat, usia dan potensi siswa. Materi-materi pelajaran diselenggarakan bukan dengan melihat 'kapasitas' siswa melainkan 'mimpi' sekolah tentang siswanya. Mimpi yang dipupuk oleh kebuasan modal ditambah dukungan fasilitas negara. Dalam bahasa J Drost, sekolah selalu bertolak dari pengandaian yang salah tentang anak, yakni bahwa 'anak itu seakan manusia tua yang berumur muda' atau bahwa 'anak itu orang dewasa ukuran kecil'. Menyakitkan, membelenggu dan tidak imajinatif. Lihat saja susunan pelajaran kelas 1 SD:

1. PKn (Pelajaran Kewarganegaraan)
2. Bahasa Indonesia
3. Matematika
4. IPA
5. IPS
6. Olah Raga
7. Agama
8. Seni

Ada paling tidak 8 mata pelajaran yang wajib dikunyah. Biasanya mereka masuk, yang normal pukul tujuh pagi sampai sepuluh pagi. Ada yang pulang hingga jam setengah satu. Ada yang malah pulang jam lima sore. Makin malam pulang biasanya sekolah itu jadi tampak hebat dan unggul⁶. Keunggulannya selain diukur dari kepulauan juga kemampuan menciptakan murid lebih hebat ketimbang usianya. Padahal kebutuhan sekolah dasar, menurut YB Mangunwijaya, mewedahi pemekaran anak yang eksploratif, kreatif dan integral. Jadi bukan tergantung pada banyaknya pelajaran, melainkan keberanian anak bertanya, mendorong kreatifitas dan sadar kalau kehidupan sosial itu kompleks dan rumit. Tapi tampaknya pendidikan sekarang ini membuang petuah itu. Lebih memilih untuk membuat anak hebat dan lebih hebat!

⁶ Dalam setahun jam pelajaran anak SD hingga SMA di Indonesia ternyata lebih dari 1.000 jam per tahun. Angka ini terlama di dunia padahal, jumlah jam sekolah di Negara-negara Asia Pasifik (yang bukan termasuk Negara maju) hanya 900-960 jam per tahun. Tahu khan betapa hebatnya mutu pendidikan di Indonesia karena penggunaan jam pelajaran yang panjang ini. Lih Kompas 9 Febr 2006

Lebih hebat! Simaklah pelajaran PKn kelas 1 SD yang sudah memberitahukan tentang tugas pejabat politik setingkat DPR. Tengok pelajaran bahasa Indonesia yang mengawali dengan bacaan luas tentang kepulauan. Dan IPS memuat tentang sejarah, posisi dan tokoh. Lengkap dan berat untuk anak usia 6 atau 7 tahun. Ini belum matematika yang pembagian, perkalian dan jarak menjadi pelajaran utamanya. Paling dahsyat adalah agama yang sudah menghafal hadits, doa dan kisah semua utusan Tuhan.

Saksikan juga ruangan sekolah kita: bangku teratur rapi dengan tanpa perkakas apapun. Lukisan hanya boleh dipasang oleh sekolah. Pekarangan yang mulai menyempit. Bujur meja yang berwarna coklat dan beku. Jendela yang terpasang dengan apa adanya. Hampir semua sekolah berwarna serupa. Jika ada fasilitas itu paling AC dan sedikit sekolah yang membuka kreativitas siswanya untuk boleh menata dan mengatur ruangnya sendiri. Saya Shiraishi dalam penelitiannya membuktikan bagaimana seorang anak sejak dini dibelenggu oleh kontrol yang dijalankan oleh guru. Guru juga dikontrol oleh kepala sekolah. Lalu kepala sekolah diawasi oleh pengawas. Terus hingga eselon yang paling tinggi. Pendidikan kemudian bercampur-baur dengan kebutuhan praktis politik.

Dalam bidang pembelajaran kontrol ini dilakukan lewat beban berat pelajaran. Semua mata pelajaran terus dicangkokkan pada anak sejak dini. Tanpa melihat dan mempertimbangkan kemampuan. Misalnya sejak kelas 1 SD sudah dilatih pelajaran bahasa Inggris, Mandarin dan komputer dengan cara yang lebih intensif. Kata lain untuk tidak menyatakan: puas! Lalu juga mulai digembleng akhlak dan perangnya. Melalui selusin pelajaran agama yang didesain dengan beragam. Ada yang dikasih buku petunjuk berbuat baik yang wajib diisi tiap hari. Ada yang diminta menghafal doa setiap hari. Ada yang dituntut untuk berlaku baik dalam hal apapun. Maksudnya mengucapkan doa tiap kali memulai perbuatan. Situasi ini nampaknya terjadi secara massal. Baik sekolah negeri maupun swasta beban pembelajaran makin ditambah volumenya. Sejumlah buku LKS digencarkan agar semua siswa pintar menjawab; bukan mahir bertanya.

Sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan kalau dalam proses pembelajaran ada banyak bentuk pelanggaran HAM. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai kondisi peserta didik yang berada di bawah tikaman pembelajaran yang menyesatkan:

Methodologi Pembelajaran	Pelanggaran Hak Peserta Didik	Dampak terhadap Peserta Didik
Penggunaan dan muatan buku pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - mengabaikan kemajemukan dan tidak sensitif gender - menimbulkan stigmatisasi dan permusuhan⁷ - membebani baik secara psikis maupun kemampuan ekonomi peserta didik⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> - benih fanatisme dan kekerasan muncul pada peserta didik - mendorong agresivitas untuk menyerang pihak lain - tidak menghargai buku sebagai sumber pembelajaran melainkan komoditas

⁷ Buku paling controversial adalah sejarah terutama peristiwa 1965. Kejaksan atas permintaan Diknas pernah membakar buku pelajaran sejarah yang tak mencantumkan kata PKI di dalamnya. PKI jadi hantu yang terus membayangi peserta didik sejak usia SD hingga SMU. Padahal sudah banyak penelitian sejarah terbaru dan diterbitkan tentang peristiwa itu. Tampaknya perkembangan ini tidak begitu dihiraukan oleh pejabat Diknas setempat.

⁸ Tak ada buku pelajaran seperti disini yang selalu saja berganti hampir tiap tahun. Padahal pergantian ini hanya mengubah wajah sampul saja. Apalagi kalau buku itu di belakangnya ada soal-soal yang sudah dijawab. Buku pelajaran yang tak bisa diwariskan menjadi keluhan umum orang tua. Bukan sekedar biaya tapi ini bentuk pembodhan paling menakutkan. Apalagi terbukti belakangan ini proyek buku membawa soal korupsi pada sejumlah kepala daerah

Model dan bentuk pengajaran	<ul style="list-style-type: none"> - mengabaikan hak-hak anak (berkarya, bermain, kreativitas) - masih banyaknya bentuk kekerasan dan penghukuman fisik maupun psikis yang menimbulkan trauma pada anak - tidak meletakkan anak sebagai subyek peserta didik melainkan objek pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - anak menjadi miskin pilihan dalam berkarya dan kecerdasan diukur dalam satu perspektif - anak menjadi korban kesewenang-wenangan model pendidikan yang menuntut semuanya serba sama - anak hanya jadi 'alat dan pelengkap' proses pendidikan
Lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya hak untuk bermain karena model bangunan fisik yang tidak memiliki pekarangan - mengabaikan peran sosialisasi anak ke masyarakat sekitar karena bentuk eksklusif sekolah⁹ - mengabaikan hak memilih anak dalam mengkonsumsi maupun bermain 	<ul style="list-style-type: none"> - anak tidak punya banyak pilihan dalam beraktivitas dan membuat kemampuan ber-ekspresi jadi sangat terbatas - anak akan cenderung lebih individualistik karena sekolah yang tidak mendorong pada pergaulan sosial dengan lingkungan sekitar - hilangnya hak anak untuk memilih karena beban ketentuan dari sekolah dalam membelanjakan uang atau memilih tempat bermain
Model dan bentuk evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - tidak melihat pendidikan sebagai 'proses' tapi 'bentuk akhir' - sistem evaluasi yang seragam dan tidak bercermin pada kemampuan lokal tiap lembaga pendidikan¹⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> - anak hanya terpusat prestasinya pada tiga atau empat pelajaran yang dijadikan ujian nasional - belajar bukan lagi upaya untuk merawat tradisi mencari pengetahuan tapi bagaimana berhasil menguasai pelajaran - kemampuan imajinasi, bertanya dan berfikir sistematis makin merosot¹¹

⁹ Inilah yang hilang dalam pendidikan kita dimana anak dilenyapkan pemahamannya tentang kenyataan social, melalui, ancaman dan hukuman atau penipuan argumentasi. Mengatakan kalau kemiskinan karena kemalasan sama dengan bilang kalau kekayaan muncul karena kerja keras. Padahal anak banyak sekali melihatkontradiksi terhadap dalil itu, kerja keras tak berbuah kaya dan malas tak kemudian berujung miskin. Itu sebabnya pendidikan kemudian kehilangan emosi, karena semua ekspresi anak kemudian ditindas dan dituntut untuk selalu bersikap patuh, ramah dan baik kepada sesamanya. Itu sebabnya budaya pendidikan kemudian hanya menanamkan pikiran yang kerdil dan naif. Yang menguatirkan muncul sikap konformis. Lih Erich Fromm, Mendidik si Automaton, dalam *Menggugat Pendidikan*. Pustaka Pelajar, 1999

¹⁰ Keributan sekarang agak menggelikan antara Mendiknas dengan parlemen. Menyangkut soal istilah antara Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) bukan UNTUS (Ujian Nasional yang Terintgerasi Ujian Sekolah) Bahkan biaya UN SD jika dilihat dari total keseluruhan Rp 1,15 triliun ternyata tak membuat Mendiknas melakukan evaluasi.

¹¹ Pendidikan kita lemah dalam tradisi bertanya. Peserta didik tak pernah belajar kalau manusia yang bertanya sesungguhnya jauh lebih tinggi tingkatnya daripada yang pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Itu sebabnya pola pengajaran pendidikan di Indonesia lebih didaktik, bukan dialektik, yaitu mengabaikan konflik dan terus berpusat pada keselarasan. Lih YB Mangunwijaya, Impian dari Yogyakarta, Kompas 2003

Jika menengok apa yang tertera di tabel, benarlah apa yang dikatakan oleh Gordon Dryden & Jeanette Vos:

‘sungguh mengejutkan bahwa ‘mata pelajaran’ terpenting justru tidak diajarkan di kebanyakan sekolah, yaitu *cara menentukan masa depan* dan *cara menciptakan ide-ide baru*’

Mungkin itu yang membuat sekolah jadi kegiatan menyedihkan buat siswa. Sewaktu saya di Malino, men- tranning anak-anak SMU-jika ada pertanyaan tentang: apa kegiatan yang disukai di sekolahmu, jawabnya adalah: libur, pulang dan jam kosong. Ini hinaan terbaik bagi Diknas dan Menterinya yang selalu bangga dengan nilai UAN. Dan sialnya keadaan ini tak hanya terjadi di sekolah formal tapi juga sekolah Kedinasan. STPDN dengan kisah adu jotosnya yang terkenal. Akpol dengan cerita bangku-bangku yang dipasang paku. Walau ada kritik yang terus berhamburan tapi sekolah dengan materi pelajarannya seolah tidak terusik. Pendidikan dengan konsisten tetap menindas akal sehat dan kreativitas orang yang ada di dalamnya. Persis seperti kritik yang dilakukan oleh Ivan Illich¹².

Derita siswa itulah yang kemudian membawa sejumlah kasus-kasus yang menghebohkan:

Kasus	Korban	Latar Belakang
Bunuh Diri	Ada 36 siswa sepanjang tahun 2006 yang melakukan bunuh diri	Tidak kuat bayar SPP, malu dengan sesama teman, tida bisa ikut program wisata sekolah
Kesurupan	Ada 6-7 sekolah setingkat SMU yang punya persoalan kesurupan melanda siswanya	Tidak diketahui langsung penyebabnya hanya kadang muncul kecemasan massal ketika menjelang Ujian atau ketika sekolah kena gusur
Penculikan	Kasusnya terus meningkat dari 15 tahun 2005 meningkat 26 pada tahun 2006	Eksklusifisme sekolah, ketimpangan ekonomi hingga bisnis kejahatan
Perkelahian massal	Kasusnya terus meningkat terutama di kota-kota besar (sepanjang 2006 ada 33 kasus perkelahian antar sekolah) seiring dengan pertumbuhan gank remaja	Ruang publik yang kian menyempit, meniru yang dilihat, pembelajaran yang hierarkhis dan keras

Kasus-kasus ini bukan makin menurun tapi mengalami peningkatan signifikan. Jika ditelusuri semua kasus ini penyebab terbesarnya karena dunia pendidikan mengabaikan potensi dan hak siswa. Potensi siswa bukan sekedar kecerdasan tapi juga kematangan berorganisasi, keluasan pergaulan dan keinginan untuk terus menggali kreativitas. Pendidikan yang diselenggarakan selama ini kurang melihat hal-hal itu. Juga tidak mempertimbangkan hak-hak siswa. Hak bermain, dihargai pendapatnya, dilindungi dan diapresiasi gagasannya. Sekolah terlanjur meletakkan semua siswa pada jalur yang

¹² Dewasa ini pendidikan telah menjalankan tiga fungsi (1) sebagai gudang mitos masyarakat (2) pelembagaan kontradiksi-kontradiksi yang dibawa oleh mitos tersebut (3) sebagai locus ritual yang memproduksi serta menyelubungi perbedaan-perbedaan antara mitos dan realitas. Lih H.A.R Tillar, Manifesto Pendidikan Nasional, Kompas, 2005

seragam. Bahkan meletakkan prinsip negatif dalam semua pengelolaan pengajaran¹³. Pintar harus diberi hadiah, dikasih ranking dan kalau perlu semua murid harus seperti itu. Gagasan sekolah unggulan berangkat dari tesis seperti ini. Itu yang makin membuat pendidikan jadi kegiatan yang merusak akal sehat sekaligus melanggar HAM. Tragis bukan!

3. Kisah Akhir

Suatu hari saya tiba di kota kaya Kalimantan. Sangata tepatnya. Kabupaten yang telah meng-anggarkan pendidikan sebesar 20%. Kepala Daerahnya bangga. Seorang pejabat yang merangkap ketua dewan pendidikan. Pintar meyakini, pandai mengubah lagu dan paling senang bicara lama. Ia simbol dari pejabat yang seolah percaya kalau pendidikan hanya 'soal anggaran'. 20% angka politis yang kerap dikatakan oleh para pengamat, pendidik dan pemerintah. Padahal angka kebocoran dana pendidikan sudah tak terhitung. Kisah gagalnya dana BOS mencerminkan ketidak-mampuan kelola budget. Dana sesungguhnya bukan soal utama. Pengabaian pemerintah dalam dunia pendidikan bukan sekedar dana. Pandangan yang seringkali mengabaikan prinsip perlindungan sosial pada warganya, yang semestinya jadi tugas dan tanggung jawab negara.¹⁴

Hak peserta didik sudah lama diabaikan. Ada banyak anak usia sekolah yang tak mampu menikmati pendidikan. Program wajib belajar yang tidak dilandasi dengan kebijakan tegas bisa berujung pada slogan. Mengatakan gratis tapi tak ada anggaran rutin sama saja dengan menipu. Kesempatan untuk mendapat akses jadi perkara yang perlu diselesaikan dulu. Tak ada jalan lain kecuali melakukan pendataan terhadap penduduk usia sekolah yang tak bisa sekolah. Dan ada semacam upaya paksa. Sebab ini menyangkut hak penduduk yang menjadi kewajiban negara. Sejumlah pengamat mengisyaratkan contoh keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) Kata mereka: tak ada salahnya meniru keberhasilan program ini.

Jalan keluar wajib belajar juga perlu mempertimbangkan materi pembelajaran. Itu sebabnya gagasan Freire menarik untuk jadi kutipan: 'kami menghendaki suatu program pemberantasan buta huruf yang sekaligus merupakan introduksi bagi demokratisasi kebudayaan; program yang melibatkan manusia sebagai subjek dan bukan sebagai penerima pasif semata' artinya program pembelajaran sebaiknya mengembangkan wawasan dan prinsip demokratis. Kekuatiran pendidikan yang berjalan selama ini adalah menghapus kemampuan itu. Kebutuhan untuk segera dipakai dalam dunia pasar kerja membuat pendidikan berdiri diatas landasan pragmatis yang dangkal. Sebuah pilihan yang akan mengkerdulkan arti dari pendidikan itu sendiri. Sebagaimana pernah dikatakan oleh J Drost: tugas universitas bukan pertama-tama memberikan kepada masyarakat apa yang dihendaknya melainkan apa yang dibutuhkananya.

Sebab pragmatisme hanya membuat pendidikan jadi arena pembodohan massal. Kisah terakhir ini membuktikan kebenaran dalil diatas:

¹³ J Drost menyebut sebagai pendidikan yang berpola negative. Kata pokok dalam pola pendidikan itu ialah 'jangan'. Jangan ini jangan itu. Di sini anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan emosinya dan dengan demikian juga tidak terlatih untuk mengendalikannya. Lih Basis Nomor 01-02 Januari-Februari 1998

¹⁴ Ian Gough (2004) menyatakan kalau Demokrasi tampaknya belum mengubah cara pandang negara terhadap perlindungan social warga negara. Ian Gough menyatakan kalau Indonesia (1) Kebijakan social tidak menjadi wilayah yang penting dan otonom, tetapi diabdikan kepada pertumbuhan ekonomi (2) Negara lebih mengurus regulasi kesejahteraan ketimbang penyediaan barang dan jasa kesejahteraannya sendiri. Dengan kata lain kebijakan social dan jaminan social dipandang sebagai konsumtif ketimbang produktif. Itu sebabnya pemerintah Indonesia pelit kepada warganya. Belanja kesehatan, pendidikan dan pangan di Indonesia sebelum dan paska krisis Cuma 3 persen PDB, padahal di Negara-negara sebaya seperti Malaysia dan Thailand telah mencapai level 6% PDB. Lih Mingguan Tempo 12 November 2007

Satu saat saya tiba-tiba didatangi seorang guru dari Purwokerto. Kebetulan ada peresmian pengurus gerakan di kota itu. Ia mengaku kawan seorang aktivis pergerakan Guru di Bandung. Ia cemas akan maraknya Pilkada yang telah membuat kepala sekolah hingga jajaran guru diajak untuk terlibat kegiatan dukung-mendukung calon. Ia bercerita kalau kegiatan politik ini membawa akibat yang serius. Kemenangan calon memang membuat sang kepala sekolah bisa naik jabatan tapi kekalahan dapat membuatnya dibuang. Kondisi itu yang membawa dampak 'harga' posisi kepala sekolah jadi bagian dari arena tawar-menawar. Dimana kepala sekolah berada, disitu akan ketahuan berapa sesungguhnya harga yang sudah disetujui. Ringkasnya, Kepala sekolah kini bukan sekedar jabatan administratif tapi jabatan politik yang memiliki nilai tukar tinggi. Jika sudah begitu guru dan peserta didik hanya jadi ornamen dari kebutuhan praktis politik. Sekolah terutama siswanya kemudian jadi korban, baik dari praktek pendidikan, praktek politik maupun bisnis kelengkapan sekolah.

Mantra bisnis jadi ancaman terbesar dunia pendidikan sekarang. Mahalnya sekolah dan gagasan privatisasi telah meluapkan kembali problem usang soal komersialisasi pendidikan. Terlebih keputusan umum perdagangan bebas yang meletakkan pendidikan sebagai cabang usaha kian menegaskan kekuatiran kita akan soal akses. Siapa yang kelak mampu duduk di bangku sekolah unggulan? Siapa yang dapat mencicipi sekolah internasional yang fasilitasnya bermutu? Siapa yang paling untung ketika bisnis pendidikan menjadi kegiatan yang bersimbah laba? Inilah periode dimana sistem kapitalisme global kemudian mengguncang sendi-sendi pokok peran negara. Terutama tugas pokoknya mencerdaskan kehidupan rakyat. Dengan memposisikan pendidikan sebagai produk perdagangan maka negara hanya fungsinya sebagai tenaga administrasi dan untuk seterusnya diserahkan pada aturan main pasar. Kendali pasar pada lembaga pendidikan ini akan jadi berita memilukan bagi mereka yang miskin dan tersingkirkan.¹⁵

Mungkin tak ada yang bisa tepat menyimpulkan keadaan ini kecuali dengan puisi. Sebuah puisi yang bisa merangkum apa yang kini terjadi di lingkungan pendidikan kita:

Pada masa kanak-kanakku
Setiap jam tujuh pagi
Aku harus seragam
Bawa buku harus mbayar
Ke sekolah

Katanya aku bodoh
Kalau tidak bisa menjawab
Pertanyaan guru
Yang diatur kurikulum

Aku dibentak dinilai buruk
Kalau tidak bisa mengisi dua kali dua
Aku harus menghafal
Mataku mau tak mau harus dijejali huruf-huruf
Aku harus tahu siapa presidenku
Aku harus tahu ibukota negaraku
Tanpa aku tahu
Apa maknanya bagiku

¹⁵ Perkembangan paling mutakhir adalah bisnis Franchise pendidikan, seperti Tumble Tods, High Scope Scholl, LPIA Kids, Kids 2 Success English. Lih laporan Pengusaha (Peluang Usaha dan Solusinya) edisi 58, Maret 2006

Pada masa kanak-kanakku
Aku jadi seragam
Buku pelajaran sangat kejam
Aku tidak boleh menguap di kelas
Aku harus duduk menghadap papan di depan
Sebelum bel tidak boleh mengantuk

(Kenangan anak-anak Seragam, Wiji Thukul)